

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana Kerja Kecamatan Sibolga Sambas merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020 untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Rencana Kerja berpedoman kepada Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Berita Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312, maka perlu menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sibolga Sambas tahun 2020 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Sibolga untuk tahun 2020.

Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Sibolga, yang secara substansial memuat rencana kerja, program dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi/sub fungsi pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Renja berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional Renja merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sibolga Sambas adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Sibolga No. 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Sibolga;
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 31 Mei 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga;
12. Peraturan Daerah Kota Sibolga No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sibolga Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan dokumen Renja Kantor Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2019 adalah untuk memberikan pedoman gambaran dan arah pembangunan di Kecamatan Sibolga Sambas pada Tahun 2020.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu upaya Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas memberikan informasi terkait rencana program dan kegiatan tahun 2020 sehingga dapat memberikan gambaran juga terhadap Penetapan Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;
- b. Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil dan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2019.

### **1.4. Sistematika Penyusunan Renja**

Agar diperoleh pemanfaatan yang optimal dari Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sibolga Sambas, maka sistematika Penulisan Renja diupayakan untuk mampu menjadi Pedoman dan mudah difahami dalam kerangka pelaksanaan penyelenggara pemerintahan dan perumusan kebijakan teknis di tingkat Kecamatan.

Adapun sistematika penulisan Renja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

## **BAB. I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Memuat pengertian ringkas Renja SKPD, proses penyusunan Renja, keterkaitan Renja dengan RKPD, Renstra SKPD, Renja K/L dengan Renja Propinsi serta penyusunan RAPBD.

### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perda, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

### **1.4 Proses dan Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD (Tabel 1)**

Memuat kajian review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD (Tabel 2)

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja SPM, IKU (PermenPAN No.29 Tahun 2010) ataupun IKK (PP No. 6 Tahun 2008 & PP No. 38 Tahun 2007).

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD, permasalahan, hambatan, peluang dan tantangan dalam tupoksi dan peningkatan pelayanan SKPD, dampak terhadap pencapaian visi dan misi KDH serta perumusan program dan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel 4)

Memuat hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

# **BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

## 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

## 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

## 3.3 Program dan Kegiatan (Tabel 5)

# **BAB. IV PENUTUP**

## LAMPIRAN

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

#### **TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sibolga Sambas**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Tahun 2019 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Tahun 2019 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Tahun 2019, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

- a) Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b) Tujuan yang dikehendaki;
- c) Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d) Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Tahun 2019 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2019 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2020;
2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Sibolga Sambas. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2020. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

#### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.



## ***B. Capaian Analisis Kinerja***

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

### **Evaluasi Program Tahun 2018**

Anggaran Tahun 2018 Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga sebesar Rp. 2.836.052.500,- (termasuk perubahan) dengan 15 program dan 43 kegiatan (termasuk program dan kegiatan wajib SKPD serta urusan semua SKPD). Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 2.738.747.100,- dengan capaian kinerja sasaran dan capaian kinerja keuangan sebesar 96,56%.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja atas capaian dan target strategis pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis menurut indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, maka capaian kinerja dan jumlah akhir masing-masing, kegiatan dalam setiap program adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat dilaksanakan dengan baik dengan nilai capaian 98% ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dapat dilaksanakan dengan baik dengan nilai capaian 95% ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dapat dilaksanakan dengan baik dengan nilai capaian 98% ;
4. Program Peringatan Hari-Hari Besar dapat dilaksanakan dengan baik dengan nilai capaian 99%,
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dapat dilaksanakan dengan baik dengan nilai capaian 76% ;

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang kegiatannya yaitu Musrembang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan, capaiannya sebesar 100% ;
7. Program Penataan Daerah Otonomi Baru dapat dilaksanakan dengan baik dengan nilai capaian 95% ;
8. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU dapat dilaksanakan dengan baik dengan nilai capaian 92% ;
9. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dapat dilaksanakan dengan baik dengan nilai capaian 100%
10. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dapat dilaksanakan dengan baik dengan nilai capaian 99% ;
11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan dengan baik dengan nilai capaian 99% ;
12. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat dilaksanakan dengan baik dengan nilai capaian 100% ;
13. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan dengan baik dengan nilai capaian 99% .
14. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dapat dilaksanakan dengan baik dengan nilai capaian 100%
15. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dapat dilaksanakan dengan baik dengan nilai capaian 88 % .

### **Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018**

Usulan Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 2.836.052.500,- terurai dalam 15 program dan 43 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan Tahun 2017, baik realisasi keuangan maupun realisasi sasaran.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga sebagai berikut:

1. Kurangnya kemampuan aparatur baik kelurahan maupun kecamatan terkait tata cara, tata karma, etika dan performance dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Masih lemahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap program dan kebijakan peningkatan kualitas diri melalui program Pemberdayaan Masyarakat
3. Kurangnya Koordinasi antar SKPD/ Instansi Vertikal dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembnagunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

#### **KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN**

1. Koordinasi yang intens dan komunikatif dengan instansi terkait dan pimpinan yang lebih tinggi;
2. Sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat guna peningkatan kualitas diri melalui program pemberdayaan masyarakat;
3. Monitoring dan Evaluasi.

4. Membuat telaahan staf tentang evaluasi pelayanan ke depan kepada Walikota;
5. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur khususnya pelatihan terkait etika dan tatakrama dalam memberikan pelayanan ;
6. Studi Banding ke daerah lain khususnya kecamatan yang unggul dalam memberikan pelayanan Prima dan meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam setiap Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah;

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Tahun 2016–2021, maka diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga pada Tahun 2019.

### **Strategi :**

Adapun strategi Kecamatan Sibolga Sambas adalah :

- a. Peningkatan Pelayanan Prima kepada masyarakat :
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana/Fasilitas Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan;
  - Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun bersangkutan terhadap 14 unsur pelayanan;
  - Penerapan Standar Operasional Prosedur dalam eksekusi pelaksanaan pelayanan di Kecamatan dan Penyusunan Standart Operasional Prosedur Pelayanan di Kelurahan.
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan:
  - Memberikan kesempatan bagi aparat kelurahan dan kecamatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
  - Melaksanakan Pengawasan pembinaan terhadap aparatur pemerintah kelurahan melalui kegiatan monitoring;

- Memberikan pengarahan tugas / fungsi penyelenggara pemerintah dan memberikan motivasi kepada aparat kelurahan / Kecamatan untuk melaksanakan tupoksi sesuai dengan prosedur/aturan yang berlaku melalui rapat koordinasi dan jam pimpinan oleh camat.
- c. Mempasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Instansi di Lingkungan Kecamatan :
- Menyelenggarakan Koordinasi satu atap dan Lintas Instansi di lingkungan Kecamatan;
- d. Mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat :
- Mengikutsertakan masyarakat dalam penyuluhan dan pelatihan yang diadakan baik oleh kecamatan maupun oleh dinas/instansi terkait lainnya;
  - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan;
  - Mendorong Instansi / UPT/ UPTD agar selalu konsisten dengan dokumen usulan Perencanaan yang telah disepakati dan menjaga komitmen terhadap dokumen usulan perencanaan tersebut;
  - Menjadikan masyarakat sebagai fokus peningkatan kualitas melalui keikutsertaan / partisipasi dalam program pemberdayaan disegala bidang kehidupan yang diselenggarakan oleh pemerintah baik pusat, Provinsi maupun daerah Kota Sibolga.
- e. Menindaklanjuti usulan program pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat.
- Mengupayakan secara maksimal usulan program pembangunan agar dapat terealisasi.

- f. Melaksanakan pembinaan terhadap Aparatur Pemerintah Kelurahan.
  - Menyelenggarakan pelatihan – pelatihan bagi apatur kelurahan.

**Kebijakan :**

- a. Diseminasi Program Kegiatan dan Kebijakan Pemberdayaan baik oleh pemerintah pusat, Provinsi dan Kota Sibolga kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan program dan kebijakan pemerintah;
- c. Mengintegrasikan semua elemen perencanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan menuju pembangunan peningkatan kualitas kemandirian bagi masyarakat.
- d. Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kelurahan dan kecamatan secara realtime report.
- e. Menatur teknik mengenai keterlibatan public dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan musrembang di setiap lingkungan dan tahapannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dengan Renstra SKPD yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dirangkum kedalam Tabel 1 yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD (Dapat dilihat pada Lampiran I).

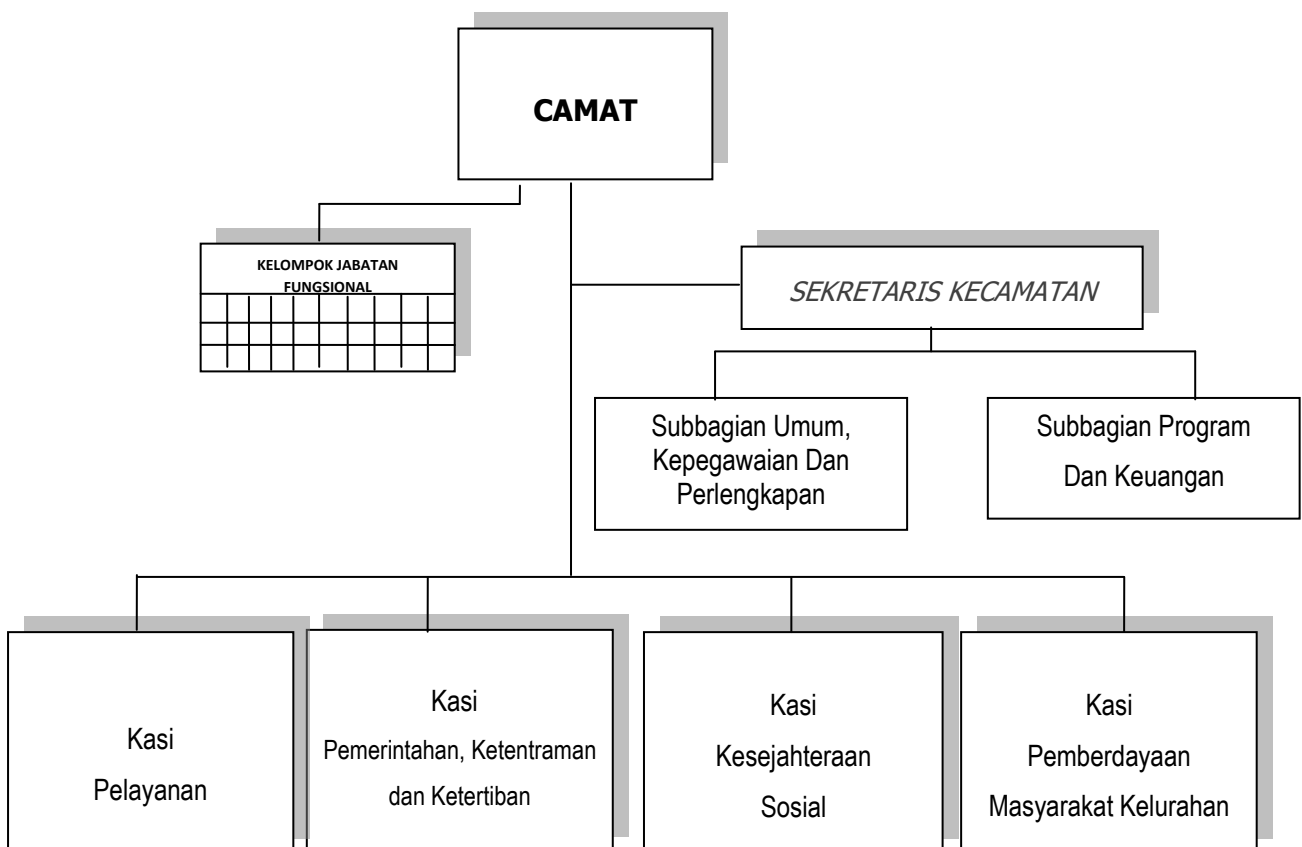
Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 pada halaman lampiran dapat dijelaskan bahwa semua program yang telah direncanakan dalam renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tidak leluasa

dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Dari tabel dapat kita lihat bahwa hampir rata-rata semua program kerja Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga terealisasi 100%.

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS KOTA SIBOLGA

### ➤ Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Sibolga, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Sibolga Sambas adalah sebagai berikut :



Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga

Kesulitan dalam menilai kinerja birokrasi publik muncul karena tujuan dan misi birokrasi publik seringkali bukan hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat multidimensional.

Faktor lain yang menyebabkan terbatasnya informasi mengenai kinerja birokrasi publik adalah kompleksitas indikator kinerja yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik.

Berbeda dengan swasta yang indikator kinerjanya relatif sederhana dan tersedia di pasar, indikator kinerja birokrasi sering sangat komplis. Hal ini terjadi karena birokrasi publik memiliki stakeholders yang sangat banyak dan memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Stakeholders dan birokrasi publik, seperti masyarakat pengguna jasa, aktivis sosial dan partai, wartawan, dan para pengusaha sering berkepentingan berbeda-beda dan berusaha mendesakkan kepentingannya agar diperhatikan oleh birokrasi publik. Penilaian kinerja birokrasi publik cenderung menjadi jauh lebih sulit untuk dilakukan.

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Kantor Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga sejak tahun 2016 melalui Peraturan Walikota Sibolga Nomor 01 tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota kepada Camat dan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 24 Juni 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota kepada Camat, juga peraturan Walikota Sibolga Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Standar Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Sibolga telah Menyusun Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan se-Kota



Sibolga yang meliputi 1 jenis untuk pelayanan bidang perizinan dan 18 jenis pelayanan bidang Non Perizinan yang ada di Kecamatan Sibolga Sambas yaitu :

➤ Pelayanan Bidang Perizinan

1. Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

➤ Pelayanan Bidang Non Perizinan

1. Pemberian Surat Rekomendasi Permohonan izin operasional tempat pendidikan formal/non formal yang dikelola oleh pihak swasta;
2. Pemberian surat rekomendasi izin penggalian jalan dan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan oleh Instansi pengelola (PDAM, PLN dan TELKOM);
3. Pemberian surat rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Pemberian surat rekomendasi izin gangguan usaha;
5. Pemberian surat rekomendasi pembuatan KK;
6. Pemberian surat rekomendasi pembuatan KTP;
7. Pemberian surat rekomendasi surat Pindah;
8. Pemberian rekomendasi surat keterangan Ahli Waris;
9. Pemberian surat rekomendasi izin menara telekomunikasi (Tower);
10. Pemberian surat keterangan tanah tidak sengketa;
11. Pemberian surat rekomendasi izin penimbunan laut  $\geq 1.000m^2$  ;
12. Pemberian surat keterangan kurang mampu;
13. Pemberian surat rekomendasi izin gangguan usaha perternakan ayam, itik dan unggas lainnya, sapi, kerbau, kambing dan domba;
14. Pemberian surat rekomendasi izin gangguan usaha pemotongan hewan;
15. Pemberian surat rekomendasi izin pom bensin, distributor elfiji dan minyak tanah;
16. Pemberian surat rekomendasi izin losmen dan hotel;
17. Pemberian surat izin reklame berupa spanduk, papan nama dan billboard;
18. Pemberian surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Ke 18 jenis layanan yang masuk dalam SPP Kantor Camat Sibolga Sambas diukur tingkat capaiannya berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

- Hasil komulatif Nilai tertimbang dan konversi Pelayanan pada tahun yang bersangkutan;
- Rata-rata jumlah layanan yang masuk.

Kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Sibolga Sambas digunakan Indikator Kinerja Utama meliputi Aspek Penilaian pada tataran pengambil kebijakan, Aspek Pelaksana Kebijakan dan Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan *analisis kebutuhan pelayanan* sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga serta Indikator Kinerja Utama berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di daerah. Terdapat cukup banyak jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan harus diurus atau diselesaikan di tingkat kecamatan. Selain melayani berbagai urusan pelayanan administratif kependudukan dan perijinan, pemerintah kecamatan juga mengemban tugas melaksanakan pelayanan dasar sektoral, mulai dari urusan ketertiban dan keamanan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan upaya-upaya konkrit mensejahterakan masyarakat.

Pelayanan dasar sektoral merupakan tupoksi masing-masing SKPD terkait. Dalam hal ini SKPD Kecamatan berperan dalam mendukung capaian keberhasilan masing-masing bidang sektoral SKPD tersebut dengan meningkatkan dan memperlancar Fungsi Koordinasi, Komunikasi dan Pengawasan melalui peningkatan

kualitas diri maupun partisipasi kesadaran masyarakat untuk turut andil dan terlibat dalam membantu serta mensukseskan Program Kegiatan dan kebijakan Pemerintah.

Analisis kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Sibolga Sambas didasarkan pada Indikator kinerja terhadap analisis kebutuhan SKPD kecamatan Sibolga Sambas itu sendiri. Analisis kebijakan itu disebut juga Indikator kinerja Utama (IKU). Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan KEPMENPAN Nomor 009 tahun 2007, bahwasanya pada unit kinerja setingkat eselon III/SKPD unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan Indikator Keluaran IKU itu sendiri merupakan hasil dari VISi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan pada RENSTRA Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2016-2021.

Adapun Visi Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2016-2021 adalah : ***Sibolga Sambas Sebagai agen Pembaruan Terwujudnya Pelayanan HEBAT ( Handal, Efisien, Berdaya Saing dan Transfaran)***

Berdasarkan uraian Tupoksi serta visi misi Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga di atas maka Indikator Kinerja Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan yaitu:

- a. Nilai tertimbang dan konversi pelayanan pada survey Indeks Kepuasan masyarakat (IKM);
- b. Operasional dana bantuan dalam menunjang kinerja pelayanan kelurahan;
- c. Peningkatan sarana/Prasarana kelurahan dan kecamatan;
- d. Pembekalan Pendidikan / Pelatihan dan kursus Keterampilan bagi aparatur kelurahan dan kecamatan;
- e. Frekuensi pelaksanaan Musrembang Kelurahan dan Kecamatan;
- f. Operasional Pelaksanaan keamanan dan ketertiban lingkungan;
- g. Operasional Pemberian Makanan Tambahan Posyandu dan kegiatan PAUD / BKB Kelurahan;

- h. Partisipasi Keterampilan Masyarakat guna peningkatan kualitas diri;
- i. Partisipasi self mobilization (Memobilisasi diri sendiri) terlibat pada program, kegiatan dan kebijakan pemerintah.

Selengkapnya analisis kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Sibolga Sambas dapat dilihat pada table 2 ( Lampiran II).

## **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS dan FUNGSI KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS**

Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam pada tahap pembangunan yang akan datang diperlukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kecamatan Sibolga Sambas. Dari karakteristik daerah yang ada, pengembangan Kecamatan Sibolga Sambas dihadapkan kepada berbagai permasalahan, baik yang menyangkut keterbatasan sumber daya manusia dan juga dalam keterbatasan dana yang dimiliki sehingga belum sepenuhnya program pembangunan yang direncanakan dapat direalisasikan.

Di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sibolga Sambas masih dihadapi berbagai hambatan dan permasalahan. Hal ini perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari semua pihak agar pembangunan di Kecamatan Sibolga Sambas dapat berhasil serta pemerintahan dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Adapun masalah dan tantangan yang dihadapi dan cukup menonjol antara lain :

### **A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS (ANALISIS SWOT/STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITY, AND THREAT)**

#### **1. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL**

##### **a. Faktor Kekuatan (Strong)**

1. Telah ditetapkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebahagian wewenang Walikota kepada Camat untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah
2. Telah disusunnya Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk jenis pelayanan tertentu di Kecamatan
3. Pemberian reward dan punishment kepada pegawai yang berprestasi dan disiplin
4. Pola kerja di Kecamatan yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif
5. Adanya evaluasi terhadap program/kegiatan berdasarkan hasil LKIP/Laporan Tahunan
6. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan secara bertahap dan berkala di kelurahan maupun kecamatan
7. Adanya kebijakan nasional dari pemerintah pusat terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat diberbagai aspek bidang kehidupan.

**b. Faktor Kelemahan (Weakness)**

1. Jumlah aparat baik di kelurahan maupun kecamatan yang masih kurang memadai bagi penerapan shift pelayanan dengan identifikasi tugas pelayanan yang terbagi atas penerima tamu/pemberi informasi, penerima berkas, pemfroses berkas, dan penyerahan berkas pelayanan
2. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui musrenbang sulit untuk mengatur dan menjalin koordinasi antar instansi dalam urusan perencanaan
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif

4. Belum adanya data analisis terkait dengan jenis program pemberdayaan yang sesuai bagi masyarakat Kecamatan Sibolga Sambas dengan berbagai kondisi dan keadaan latar belakang pendidikan, budaya dan pola pikir yang ada
5. Belum adanya rekap basis data terkait dengan jumlah masyarakat yang pernah mengikuti program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah serta evaluasi terhadap masyarakat yang telah mengikuti program tersebut.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan program-program pemberdayaan diberbagai aspek bidang kehidupan masyarakat
7. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan kepada masyarakat.
8. Aktifitas masyarakat mencari nafkah acapkali menjadi kendala bagi pemerintah mengajak masyarakat pada pelaksanaan program pemberdayaan yang dicanangkan baik oleh pemerintah pusat, propinsi maupun pemerintah kota.
9. Ketergantungan masyarakat terhadap program pemerintah berbasis pemberian langsung tunai, sehingga program pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan kurang mendapat respon positif dari masyarakat

## **2. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNA**

### **a. Faktor Peluang (Opportunity)**

1. Kepemimpinan camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas

2. Penyerapan anggaran yang signifikan bagi peningkatan intensif aparatur petugas pelayanan baik di kelurahan dan kecamatan serta perbaikan sarana dan prasarana pelayanan
3. Pendidikan dan Pelatihan khusus etika, sikap dan tata krama bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mendukung pelayanan prima dan penyelenggaraan PATEN di Kecamatan.
4. Komunikasi dan koordinasi yang baik dan lancar dengan instansi/skpd lain terkait dokumen pelayanan perizinan
5. Pelibatan Kepala SKPD/Camat dalam mutasi jabatan dan staff di kelurahan maupun kecamatan
6. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik sarana dan prasarana maupun peningkatan kualitas taraf hidup bagi masyarakat melalui program pemberdayaan yang juga giat dicanangkan oleh pemerintah pusat seperti program PNPM Mandiri, dll.
7. Hubungan yang harmonis dengan instansi lain/SKPD dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholder)
8. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Sibolga sudah tertata dengan baik
9. Berkembang pesatnya Kota Sibolga sebagai Kota persinggahan dari dan ke pulau-pulau terdekat memberikan kesempatan dan peluang yang luas bagi tumbuh berkembangnya berbagai jenis industri dan perdagangan sehingga memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mandiri berusaha/berdagang dalam skala perdagangan industri rumah tangga/rumahan.

**b. Faktor Ancaman (Threath)**

1. Tuntunan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan dan hal tersebut harus tetap ditampung dan diperhatikan
2. Penetapan prioritas pembangunan dikaitkan dengan besarnya jumlah anggaran yang disetujui pada SKPD Kecamatan
3. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan yang partisipatif serta maksud dari program dan kebijakan pemerintah melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat
  - a. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di kecamatan Sibolga Sambas

Tentu saja muara dari isu-isu penting penyelenggaraan tugas diatas adalah capaian terhadap visi dan misi kecamatan, dimana visi kecamatan berkaitan dengan visi dan misi kepala daerah. Dalam hal ini jika program dan kegiatan yang telah dirumuskan lewat visi dan kepentingan masyarakat menemui hambatan, tentunya tingkat capaian terhadap pencapaian visi dan misi kecamatan persentasenya akan berkurang juga, dan secara lebih umum dan besar lagi dapat mengganggu persentase pencapaian visi dan Misi Pemerintah Kota dalam hal ini Kepala daerah terpilih.

Dari berbagai permasalahan/hambatan dan peluang/ancaman diatas, dapat dirumuskan perumusan kebijakan berupa program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan sesuai dengan permasalahan dan hambatan yang ada diatas.



## **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 3 lampiran Review terhadap rancangan awal RKPD.

## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Pada Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Sibolga Sambas tahun 2020 telah diterima serta diinventaris berbagai aspirasi dan usulan dari berbagai stakeholder khususnya masyarakat Kecamatan Sibolga Sambas yang sifatnya fisik maupun non fisik. Berbagai usulan tersebut dirangkum dalam kumpulan usulan rencana pembangunan Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2020. Usulan-usulan tersebut dibagi menjadi usulan yang ditampung dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan tupoksi kerja Kantor/dinas/badan/instansi lain yang nantinya akan dibahas pada Musrenbang kota tentang prioritas dan hal yang mendesak dari usulan masyarakat Kecamatan Sibolga Sambas.

Usulan yang masih berkaitan dengan tupoksi kerja kecamatan, ditampung, diinventaris dan ditelaah sesuai dengan program dan kegiatan pada Kecamatan Sibolga Sambas dan sesuai juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. Untuk Tahun 2018 usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat pada 4 (empat) kelurahan di wilayah kerja Kecamatan Sibolga Sambas fisik dan non fisik.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dari berbagai *stakeholder* Kecamatan Sibolga Sambas yang telah disesuaikan dengan program kegiatan serta tupoksi SKPD Kecamatan Sibolga Sambas.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

RPJMD 2015-2019 : Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dengan 3 agenda Prioritas :

1. Berdaulat dalam Bidang Politik
2. Berdikari dalam Bidang Ekonomi
3. Berkepribadian dalam bidang Kebudayaan

RPJMD Propsi 2013-2018 : Menjadikan Provinsi yang berdaya saing, menuju Sumatera utara Sejahtera dengan 9 Prioritas pembangunan:

1. Peningkatan kehidupan beragama, penegakan hokum, penguatan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), pelayanan public dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
3. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan
4. Peningkatan Penguasaan Ilmu pengetahuan, penerapan teknologi Inovasi dan dan Kreatipitas daerah.
5. Peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah imigrasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup, mendukung daya saing perekonomian
6. Peningkatan ekonomi Kerakyatan
7. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin
8. Peningkatan Produksi, produktipitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan
9. Mendukung dan mendorong kebijakan nasional daerah

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2020, prioritas pembangunan daerah Kecamatan Sibolga Sambas adalah merupakan penjabaran Matra Gerbang Sibolga Nauli pada dasarnya diarahkan untuk melaksanakan 5 (lima) agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Sibolga Tahun 2016–2021.

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sibolga tahun 2016–2021, dengan Prioritas Agenda sebagai berikut :

- a. Agenda Pertama adalah Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governace) dan bersih (clean Governance) ;
- b. Agenda Kedua adalah Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan dan pendidikan secara merata dan terjangkau bagi masyarakat;
- c. Agenda Ketiga Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih merata;
- d. Agenda Keempat Mempersiapkan SDM yang memiliki integritas, handal dan berdaya saing
- e. Agenda Kelima Pengembangan Infrastruktur perkotaan dan fasilitas publik serta penataan kawasan perkotaan.

Prioritas pembangunan Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2020 yang dirumuskan adalah merupakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat serta diarahkan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governace) dan bersih (Clean Governace), Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mempersiapkan SDM yang memiliki Integritas Handal dan berdaya saing.

Adapun prioritas-prioritas pembangunan Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2019 yang dituangkan pada matriks prioritas pembangunan Tahun 2020 yang diarahkan untuk melaksanakan 5 (lima) agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Sibolga Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Publik yang Profesional, Prima dan berkualitas;  
Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang professional, prima dan berkualitas kepada masyarakat dilakukan pengembangan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang bermutu, mudah, murah,, transparan, akuntabel dan cepat. Karenanya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur juga dilakukan seiring merupakan keniscayaan yang diharapkan mampu menjadi pelaku perubahan dan innovator dalam pembangunan daerah. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat kedepannya diarahkan dengan :
- Menata ulang prosedur ketatalaksanaan agar lebih efektif, efisien dan ekonomis dalam pelayanan publik;
  - Berfungsi dan berjalannya Standar Operasional Posedur pelayanan serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap procedural yang telah dilaksanakan;
  - Pendidikan/Pelatihan tentang etika, sikap, norma dan tatakrama dalam memberikan pelayanan public
  - Melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara berkala;
  - Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan baik di kelurahan maupun di Kecamatan
  - Meningkatkan dana bantuan Operasional bagi kelurahan dan kepling demi menunjang kinerja kepling dan aparat kelurahan
- b. Meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan baik kecamatan dan kelurahan;
1. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparat kecamatan dan kelurahan untuk mengikuti diklat sesuai dengan tupoksi kerja aparatur.
  2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan oleh camat kepada pemerintah kelurahan

3. Meningkatkan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik kepada dinas/badan/Instansi vertikal guna mendukung dan mensukseskan pelaksanaan kebijakan, maupun program/kegiatan pemerintah
- c. Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
1. Memfasilitasi, berkomunikasi, dan memberikan pengawasan terhadap kebijakan dan program/kegiatan pemberdayaan oleh dinas/Instansi/skpd lain
  2. Meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kualitas diri diberbagai aspek bidang kehidupan dengan mengajak partisipasi aktif masyarakat, baik partisipasi kesadaran diri sendiri untuk berperan aktif dan terlibat pada kebijakan yang dimiliki untuk ikut serta dalam program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah guna peningkatan keterampilan yang ada dan kualitas diri.

### **3.2 TUJUAN dan SASARAN RENJA KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS**

#### **♣ Tujuan**

Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 tahun sampai dengan 5 tahun, dengan diformulasikan tujuan stratejik ini maka Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai.

Untuk itu tujuan stratejik yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan stratejik Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas adalah :

- a. Tujuan dari Misi I
  - Meningkatkan responsibilitas, transparansi dan keadilan dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, ramah dan berbudaya
- b. Tujuan dari Misi II
  - Mewujudkan hubungan yang sinergis antara pemerintah kecamatan dan kelurahan
  - Koordinasi lintas sektoral yang efektif dalam mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana, keamanan ketertiban serta pendidikan dan kesehatan
- c. Tujuan dari Misi III
  - Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses kegiatan pemerintah

♣ **Sasaran**

1. Terlaksananya pelayanan yang prima dan professional;
2. Pembinaan dan monitoring pemerintah kecamatan ke kelurahan dalam memantapkan kinerja dan tupoksi kerja;
3. Terlaksananya koordinasi guna peningkatan hasil pelaksanaan musrenbang, PAM Swakarsa, pemberian makanan tambahan serta pendidikan usia dini Balita;
4. Partisipasi keterampilan masyarakat guna peningkatan kualitas diri;
5. Partisipasi *Self Mobilization* (*Memobilisasi diri sendiri*) untuk terlibat pada program, kegiatan dan kebijakan pemerintah.

### **3.3 PROGRAM dan KEGIATAN**

Penyusunan Program dan Kegiatan di dasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah . Kondisi dan klasifikasi bidang pembangunan disusun menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah.

Program dan kegiatan yang dituangkan dari Visi, Misi, kebijakan yang telah dituangkan sebelumnya diatas. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dan pengembangan program SKPD Kecamatan Sibolga Sambas sehingga pengembangan program akan menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kegiatan pada setiap urusan, dirinci dalam kegiatan Rencana Kerja Anggaran.

Adapun Rencana Kerja Anggaran adalah kegiatan pemerintah dalam rangka penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban pemerintah yang tidak dapat di hasilkan oleh masyarakat sendiri. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka visi, misi dapat diagendakan kegiatan pokok yaitu :

1. Terwujudnya pelayanan Prima
2. Peningkatan fungsi penyelenggaraan pemerintahan baik kecamatan maupun kelurahan
3. Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat guna meninggalkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Uraian Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Sibolga Sambas yang direncanakan pada Renja Tahun 2020 adalah seperti terangkum dalam lampiran V Tabel 5 Tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kota Sibolga.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan sebagai gambaran lebih mendetail mengenai program, kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2020 akan dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2019 untuk digunakan sebagai pedoman penyusunan R.APBD Tahun 2020.

Demikianlah Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2020 ini disusun, semoga dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang lebih baik.

Sibolga, Mei 2019

**CAMAT SIBOLGA SAMBAS,**

**AHMAD YANI NASUTION**

**PENATA Tk.I**

**NIP. 19680426 198903 1 005**